

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH SEHAT LAYAK
HUNI OLEH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTAHANAN DI DESA JATIREJO KECAMATAN PASIR PENYU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana strata satu
Bidang ilmu sosial program studi administrasi publik
Pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas islam riau*

MARSA CINTIA

NPM : 157110533

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

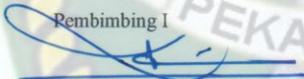
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Marsa Cintia
Npm : 157110583
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

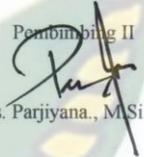
Format sistematika dan pembahasan masing –masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini., telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 21 Desember 2020

Pembimbing I


Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

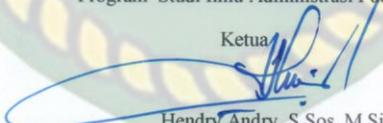
Pembimbing II


Drs. Parjiyana., M.Si

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua


Hendry Andry, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Marsa Cintia
Npm : 157110583
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni
Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Ketua



Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Sekretaris



Rosmida, S. Sos., M.Si
Anggota

Dr.H.A.Tarmizi Yussa, MA

Mengetahui,

Wakil Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. Ip.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 010/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Des 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal, 28 Des 2019 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Marsa Cintia
N P M : 157110583
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Program rumah sehat layak huni oleh dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan di desa jatirejo kecamatan pasir penyu kabupaten Indragiri hulu.**
Nilai Ujian : Angka : " 75 " ; Huruf : " B + "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs.Syapril Abdullah,M.Si	Ketua	1.
2.	Rosmita,S.Sos.,M.Si	Sekretaris	2.
3.	Dr.H.A. Tarmizi Yussa, MA	Anggota	3.
4.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Anggota	4.
5.	Dia Merina Suri, S.Sos., M.Si.	Anggota	5.
6.	Andry Kurniawan, BPM., M.Si.	Notulen	6.



Pekanbaru, 28 Desember 2019

Drs. H. Panca Setvo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 010/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Marsa Cintia**
N P M : 157110583
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Drs. Syapril Abdullah.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Rosmita.,S.Sos.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. H. A. Ahmad Tarmizi Yussa.,MA Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Drs. Parjiyana.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Dia Meirina Suri.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 6. Andry Kurniawan.,BPM.,M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

~~Ditetapkan di Pekanbaru
pada Tanggal 27 Desember 2019
An. Dekan
Drs. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik~~

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi AP
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Marsa Cintia
Npm : 157110583
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni
Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 31 Maret 2020

An. Tim Penguji

Ketua


Drs. Syapril Abdullah, M. Si

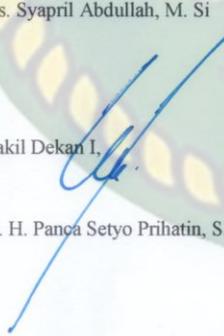
Sekretaris


Rosnita, S. Sos., M.Si

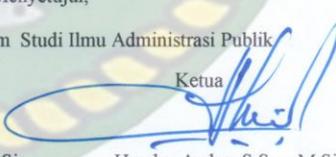
Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Wakil Dekan I,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. Ip., M. Si

Ketua


Hendry Andry, S. Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha Esa dan Sholawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis bisa menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul' **Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu** '.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof DR H Syafrinaldi SH, MCL
2. Bapak Moriss Adidi Yogia,S.sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Study Administrasi Publik beserta jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Administrasi.
4. Bapak Dr.H.A. Tarmizi Yussa.,MA selaku pembimbing I dan Bapak selaku Drs. Parjiyana.,M.Si pembimbing II yang telah memberi

bimbingan, petunjuk dan motivasi sampai selesai usulan penelitian ini.

5. Terimakasih kepada Ayahanda Junardi, ibunda Mainur, , atas do'a, cinta, kasih sayang, perhatian, dorongan semangat, serta perjuangan yang tiada pernah putus untuk penulis.
6. Terimakasih untuk seluruh teman-teman khususnya Muhammad Hidayat, Rika Ardila, Novayana Lestari, Mustika Irawati, Hardianto, Ardianto, dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administasi Publik khususnya Kelas C angkatan 2015 Universitas Islam Riau

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua. Dan penulis mendapat kritik dan saran yang tentunya lebih membuka cakrawala penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini lebih baik lagi. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap para pembacanya.

Wassallamualikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 21 Desember 2019

Penulis,

Marsa Cintia

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	13
C. Tujuan dan manfaat penelitian	14
1. Tujuan penelitian	14
2. Manfaat penelitian	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi kepustakaan	15
1. Konsep Administrasi	15
2. Konsep Administrasi Publik	17
3. Konsep Organisasi	18
4. Konsep Organisasi Publik	18
5. Konsep Manajemen	19
6. Konsep Manajemen Publik	20
7. Konsep Kebijakan	22
8. Konsep Kebijakan Publik	22
9. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	25
10. Konsep Evaluasi	29
11. Konsep Koordinasi	30
12. Konsep Kemiskinan	30
B. Kerangka pikir	31
C. Hipotesis	32
D. Konsep operasional	32
E. Operasional variabel	34
F. Teknik pengukuran	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe penelitian	41
B. Lokasi penelitian	41
C. Populasi dan sampel	42
D. Teknik penarikan sampel	43
E. Jenis dan sumber data	43
F. Teknik pengumpulan data	44
G. Teknik analisis data	44
H. Jadwal kegiatan penelitian	45

I. Rencana sistematika laporan skripsi	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Jatirejo	46
1. Sejarah desa	46
2. Demografi	47
3. Keadaan sosial	48
4. Kondisi ekonomi	49
B. Kondisi pemerintahan desa	50
1. Pembagian wilayah desa	51
2. Struktur organisasi pemerintahan desa	52
C. Masalah dan potensi desa	52
1. Bidang infrastruktur desa/sarana prasarana	59
2. Bidang pendidikan	59
3. Bidang ekonomi	60
4. Bidang pemerintahan	60
D. Potensi desa	61
1. Potensi sumber daya alam	61
2. Potensi sumber daya manusia	61
3. Sumber daya sosial	62
4. Sumber daya ekonomi	62
E. Rencana pembangunan jangka menengah desa	63
1. Visi desa	64
2. Misi desa	64
F. Kebijakan pembangunan desa	64
1. Arah kebijakan pembangunan desa	65
2. Program pembangunan desa	67
G. Strategi pencapaian	67
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas responden	
B. Hasil dan Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.....	67
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	94
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I. 1	: Nama-Nama Penerima Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Jatirejo.....	9
II. 1	: Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu	39
III. 1	: Populasi Dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu	46
III. 2	: Jadwal Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu	49
V. 1	: Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin	70
V. 2	: Responden penelitian berdasarkan umur	71
V.3	: Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	73
V.4	: Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kriteria penerima Program bantuan	74
V.5	: Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tenaga Pendamping.....	77
V.6	: Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pelaksanaan Fisik	80
V.7	: Tanggapan Responden Terhadap Indikator Monitoring Program	83
V.8	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II. 1	: Kerangka Pikir Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan DiDesa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.....	36
IV. 1	: struktur organisasi pemerintah Desa Jatirejo kecamatan Pasir kabupaten indragiri hulu	58

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuisisioner Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu	94
2 : Daftar Wawancara untuk Masyarakat Penerima Bantuan Didesa Jatirejo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	
3 : Foto Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu.....	
4 : SK Dekan Fisipol UIR Nomor : 652/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi AnMarsa Cintia	113
5 : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN- RISET/27889	114
6 : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor : 675/E-UIR/27- Fs/2019	115

7 : Surat Keterangan Dari Desa Jatirejo Pasir Penyu Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor : 170/Sk/2021/Viii/2019

116



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konfhensif yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Marsa Cintia
NPM : 157110533
Program studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul skripsi : Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfhensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat pada penulisan ini maka dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskahskripsi ini ini adalah benar hasil karya saya sendiri(tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuaidengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas danUniveristas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Pekanbaru, 21 Desember 2019
Pelaku pernyataan,


Marsa Cintia

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH SEHAT
LAYAK HUNI OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN DI DESA JATIREJO KECAMATAN PAIR PENNYU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

Oleh

Marsa Cintia

Program Rumah Sehat Layak Huni merupakan program yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan melaksanakan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni untuk menurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Provinsi Riau dan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan rumah yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu serta mencari tau permasalahan-permasalahan pelaksanaan program tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif, Sampel sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data kuisisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi serta menganalisa data yang telah tersedia pada objek penelitian dan membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan. Berdasarkan dari hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu dari 3 (tiga) indikator yang ada, Pelaksanaan Program rumah sehat layak huni sudah cukup terlaksana dengan baik. Dalam program bantuan rumah sehat layak huni ini masih terdapat terkendala yang terjadi, seperti susahnya mencari tenaga kerja yang memang sesuai dengan anggaran karena kegiatan ini dilakukan secara serentak di setiap desa serta lamanya pencairan dana sehingga terkendala dalam pengerjaannya.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF A HEALTHY HOUSING ASSISTANCE PROGRAM FOR HABITATION BY THE HOUSING AGENCY, RESIDENTIAL AND LANDING AREA IN JATIREJO VILLAGE OF JATIREJO SUB- DICTRICT OF PASIR PENYU, INDRAGIRI HULU DISTRICT

ABSTRACT

By

Marsa Cintia

The Healthy Living House Program is a program that aims to improve the quality of life for the poor. Therefore, the Department of Housing, Resettlement and Land Management implemented a Program for the Assistance for Healthy Living Habits to reduce the number of non-livable homes in Riau Province and to help the poor get decent housing. The aim of this research is to identify the success of the Livable Healthy Home Assistance program in Jatirejo Village, Pasir Penyau Subdistrict, Indragiri Hulu Regency and to find out the problems with the implementation of the program. The method used is descriptive and quantitative methods, a sample of 15 people. Questionnaire data collection techniques, interviews, observations and documentation as well as analyzing the data that has been available on the object of research and comparing with theories related to the problem. Based on the research results of the Evaluation of the Implementation of Assistance for Healthy Living Homes Program in Jatirejo Village, Pasir Penyau Subdistrict, Indragiri Hulu Regency, out of the 3 (three) indicators, the Implementation of the Habitable Healthy Homes Program is quite well implemented. In the healthy housing assistance program there are still constraints that occur, such as the difficulty of finding workers who are in accordance with the budget because these activities are carried out simultaneously in each village and the length of disbursement of funds so that constrained in the process.

Keywords: Evaluation, Implementation of Habitable Healthy Homes Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sudah sering mendengar kata administrasi dan ini bukanlah satu hal yang baru, baik dalam aspek kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan berorganisasi serta bermasyarakat . Bahkan secara sadar maupun tidak sadar kita telah melakukan kegiatan administrasi. Menurut Atmosudirjo dikutip Zulkifli (2005:17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan yang berlangsung didalamnya.

Bidang administrasi Pemerintah Daerah difokuskan pada pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan suatu tujuan untuk mencapai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Pelaksanaan Pemerintah Daerah mempunyai prinsip dasar yaitu Otonomi Daerah yang mana mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepetingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan Adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata dimasing-masing daerah merespon kebutuhan masyarakat meliputi

berbagai macam sektor termasuk didalamnya sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana terdapat dalam pasal 12 Undang-undang no 23 Tahun 2014.

Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat tinggal yang layak, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan, meskipun kenyataannya terdapat peringkat pemenuhan akan kebutuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas.

Kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh kualitas hidup ”*Quality of life*” yang dirasakan sehari-hari mulai dari aspek nutrisi sari-sari makanan, sampai ke sandang, papan dan lingkungannya. Selanjutnya Rumah diperlukan manusia untuk berteduh dan bermukim, merupakan salah satu aspek penting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (Permenpera No 22/Permen/M/2008).

Menurut WHOQoL Group (dalam Billington dkk,2010) mendefinisikan Kualitas Hidup atau Quality of Lifesebagai persepsi individu dari posisi individu dalam kehidupan dalam konteks sistem budaya dan nilai dimana individu hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar dan kekhawatiran. Kualitas hidup adalah konsep yang luas mulai terpengaruh dengan cara yang kompleks dengan

kesehatan fisik individu, keadaan psikologis, keyakinan pribadi, hubungan sosial dan hubungan individu dengan fitur-fitur dari lingkungan individu.

Perumahan merupakan pencerminan dan penjelasan secara mendetail tentang diri pribadi manusia baik secara perseorangan maupun secara berkelompok dalam kebersamaan didalam masyarakat. Dengan demikian perumahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi.

Selanjutnya Menurut UU No.1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Kemudian Layak Huni adalah rumah yang mempunyai ruang yang berfungsi sesuai dengan fungsinya dan memenuhi kebutuhan akan pengawahan dan pencahayaan.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan social. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memuhi rasa kenyamanan dan secara social dapat menjaga privasi setiap anngotakeluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga

Menurut Depkes RI (2002) ,rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat yaitu:

- a. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, pengawasan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah.
- c. Memenuhi persyaratan pencegahan dan penularan penyakit antara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas dari penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan pengawasan yang cukup.
- d. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun keadaan dalam rumah, antara lain; posisi garis sepadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar dan tidak cenderung tidak membuat penghuninya jatuh dan tergeleincir.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidaksiapan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Permasalahan yang dihadapi pada sektor perumahan dan permukiman di propinsi Riau saat ini adalah: 1) masih banyaknya perumahan penduduk yang belum memenuhi syarat rumah sehat/layak rumah layak huni. 2) Pemukiman penduduk

yang terpecah-pecah (jaraknya berjauhan), sehingga menyebabkan sulit dalam pembinaan dan tata fisik desa tidak teratur, tidak terawat beberapa fasilitas di desa, seperti jalan-jalan, parit/saluran air dan sebagainya.3) Terbatasnya fasilitas air bersih, penerangan/ lampu dan antar tempat pemukiman, serta banyaknya masyarakat yang belum punya WC yang memenuhi syarat kesehatan. 4) Kemampuan masyarakat untuk membangun rumah sehat relative kecil disebabkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan juga tergolong kecil/rendah.5) Penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih untuk perumahan dan pemukiman yang layak huni.

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 14 Kecamatan terdiri dari 16 kelurahan dan 178 Desa. Jumlah Penduduk di Indragiri Hulu sebanyak 421.922 Jiwa (2017), Sedangkan jumlah penduduk miskinnya berjumlah 29.420 Jiwa dengan persentase penduduk miskin 6,89%. Salah satu Kecamatannya yaitu Kecamatan Pasir Penyu yang terdiri dari 12 Desa. Kehidupan perekonomian di Kecamatan Pasir Penyu ini tidak semua masyarakatnya tergolong mampu, ada yang miskin. Masyarakat yang berada di kecamatan ini mayoritasnya merupakan bertani dan berkebun Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan seharinya-harinya saja tidak tercukupi dikarenakan memang masyarakatnya berpenghasilan rendah. Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pasir Penyu dapat dikatakan rendah. Dapat dilihat dari kondisi rumah yang terdapat didaerah tersebut.

Melalui Program Bantuan Pembangunan rumah sehat layak huni diharapkan dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasarnya yakni rumah layak huni, karena kemiskinan pada umumnya merupakan salah satu indikator bagi

masyarakat tidak mampu memperoleh rumah yang layak huni. Program Rumah Sehat Layak Huni bersumber dari dana APBD Provinsi Riau yang dibiayai dari dana hibah belanja langsung barang/jasa. Program Rumah Sehat Layak Hcukup menjadi Primadona ditengah masyarakat karena sangat dibutuhkan, selain itu pembangunannya juga melibatkan organisasi masyarakat setempat.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, pada tahun 2019 telah membangun Rumah Sehat Layak Huni sebanyak 1.843 unit dengan pagu anggaran Rp. 124.579.700.000,00. Setiap masing-masing wilayah Kabupaten/kota memiliki jatah rumah berbeda-beda, untuk Wilayah II yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 191 unit. Program ini dimulai dari tahun 2017 yang bentuk bantuan berupa pembangunan rumah.. Besaran Dana Rumah Sehat Layak Huni berbeda-beda sesuai dengan kabupaten masing-masing mulai dari Rp. 50.000.000-Rp.60.000.000,- Juta/unit. Proses pencairan dana Program Bantuan Rumah sehat layak huni diberikan bertahap.

Adapun salah satu Desa yang melaksanakan program rumah layak huni di Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyau adalah Desa Jatirejo. Besaran Dana yang diberikan senilai Rp. 57.500.000 Juta. Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni untuk Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu mendapat sebanyak 5 unit.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni ,

salah satu program yang dilaksanakan yaitu Pembangunan rumah sederhana layak huni atau rehab rumah layak huni. Untuk mencapai p tahuembangunan rumah Sehat layak huni ini para pelaku yang terkait dalam implementasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah rehab layak huni harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berpedoman pada prinsip pengelolaan, pendekatan dan indikator keberhasilan.

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat miskin
- b. Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di pedesaan/kelurahan/kepenghuluan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan
- d. Memberikan peluang kerja kepada warga/ masyarakat pedesaan/kelurahan/kepenghuluan dan sekaligus dapat meningkatkan pendekatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
- e. Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

Adapun sasaran dari program ini adalah meningkatnya pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin dengan tujuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup /derajat kesehatan masyarakat miskin.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang pemukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat, salah satu program yang dilaksanakan yaitu pembangunan rumah rehab layak huni sasarannya masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, baik di desa maupun diperkotaan yang belum memiliki rumah tetapi tidak layak huni. Untuk mencapai pembangunan rumah sehat layak huni ini para pelaku yang terkait dalam implementasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sehat layak huni harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berpedoman pada prinsip pengelolaan, pendekatan dan indikator keberhasilan.

Pelaksana kegiatan program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Propinsi Riau dan Organisasi Kelompok Masyarakat (POKMAS). Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah pengurus –pengurus pelaksanaan Program Bantuan yang dibentuk langsung oleh Kepala Desa .Kelompok Masyarakat terdiri Ketua Kelompok Masyarakat, Bendahara, Anggota Persiapan, Anggota Pengawasan. Dalam Melaksanakan Tugas Ketua kelompok masyarakat bertanggung jawab kepada PA/PK/PPK atas terlaksananya Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni.

Adapun kriteria Penerima Bantuan Rumah Sehat Layak Huni yaitu:

1. Rumah Tangga miskin/Keluarga Prasejahtera
2. Memiliki Rumah Tidak Layak Huni dalam kondisi rusak berat, sedang, dan ringan tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, Kenyamanan dan social

3. Berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lainnya paling kurang 5 (lima) tahun
4. Status Rumah Tidak Layak Huni pada tanah milik sendiri/hibah
5. Kepala keluarga atau anggota keluarga tidak mempunyai mata pencarian tetap standar gaji dibawah UMK
6. Belum pernah mendapat bantuan program pembangunan perumahan, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni atau bantuan perumahan lainnya untuk program perumahan.
7. Kepala Keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
8. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan
9. Kehidupan Sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin
10. Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
11. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau ada surat keterangan kepemilikan dari lurah/desa atas status tanah.

12. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Tidak permanen atau sudah rusak .
- b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti papan, bamboo,dan ilalang.
- c. Dinding atap sudah rusak sehingga membahayakan keselamatan penguninya.
- d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak
- e. Diutamakan masyarakat berusia lanjut yang sudah tidak berkerja.

Kehadiran program Rumah Sehat Layak Huni ini memang menolong masyarakat yang sedang mendambakan rumah layakhuni. Kondisi rumah yang layak memperoleh bantuan ini pun sangat diseleksi. Adapun kriteria rumahnya sebagai berikut:

1. Rumah tak layak huni berada diatas tanah dengan kriteria
 - Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
 - Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
 - Tidak dalam Status sengeketa, dan
 - Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang

2. Bahan Bangunan untuk rumah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perseorangan penerima RSLH dilokasi yang tidak terlayani oleh toko
3. Rumah sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b diberikan kepada perseorangan penerima RSLH dalam rangka melaksanakan program pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri
4. Bahan Bangunan untuk PSU Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada kelompok penerima RSLH dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak huni.

Adapun yang menerima bantuan program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel.II : Nama-nama Penerima Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyut Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5
1.	Santoso	Petani	Jatirejo, Dusun I RT.002 RW.002	Rp.57.500.000
2.	Jumiati	Petani	Jatirejo, Dusun I RT.003 RW.002	Rp.57.500.000
3.	Balus	Petani	Jatirejo, Dusun II RT.001 RW.002	Rp.57.500.000
4.	Sukatiya	Petani	Jatirejo, Dusun II RT.004 RW.002	Rp.57.500.000
5	Safi'i	Petani	Jatirejo, Dusun II RT.0041RW.002	Rp.57.500.000

Sumber : Kantor Desa Jatirejo Tahun 2019

Dari tabel diatas sangat jelas bahwa nama-nama penerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni Desa jatirejo berjumlah 5 orang(KK).Padahal masing banyak masyarakat yang seharusnya perlu mendapat bantuan rumah dari yang diusulkan .

Informasi dari Latar Belakang yang dikembangkan diatas sebagai permasalahan, ditemui dalam survey sebagai bukti :

1. Masih banyak ditemukan warga yang tidak mendapat Bantuan. Serta Kurangnya sosialisasi kepada warga masyarakat sebelum Program Rumah Sehat Layak Huni dilaksanakan.
2. Belum Terpenuhinya kebutuhan Rumah Layak Huni untuk Rumah Tangga Miskin. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019.
3. Barang material yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah seperti lebih banyak penggunaan bahan pasir dari pada semen, sehingga warga yang menerima bantuan merasa tidak puas dengan bentuk bangun tersebut

Dengan ditemukannya masalah-masalah yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti yaitu dengan judul : “Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang:“ Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu “.Adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Hambatan-Hambatan Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian

Dilihat dari latar belakang masalah maka :

1. Adapun Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah, Tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu
2. Untuk mengetahui Penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Adapun Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah serta menerapkan teori – teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.

2. Sebagai masukan serta informasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep administrasi

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat didalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian Administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yang dikemukakan oleh Irra Chisyanti Dewi (2011:3) sebagai berikut:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata Administrative (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerja tulis menulis atau ketatausahaan atau keseterasisan, meliputi kegiatan: menerima, mencatat, menghimpun, mengelolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.
2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Sedangkan Hadari Nawawi (dalam Syafie, 2003;5) Mengemukakan bahwa

Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Pasalong (2014;3), Administrasi merupakan pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Silalahi berpendapat bahwa administrasi adalah penataan dari kegiatan-kegiatan individu eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi upaya kerja sama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan beberapa tujuan yang telah ditentukan (dalam Zulkifli 2014;10)

The Liang Gie mendefinisikan Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Zulkifli 2014;14)

Pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi:

1. Organisasi (tata keragaan)
2. Manajemen (tata pimpinan)
3. Komunikasi (tata hubungan)
4. Informasi (tata keterangan)
5. Personalia (tata kepegawaian)
6. Finansial (tata keuangan)
7. Material (tata pembekalan)
8. Relasi publik (tata humas)

Agar tujuan dan cita-cita manusia dalam sekelompok masyarakat tercapai salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengorganisasikan berbagai tujuan dan cita-cita tersebut sehingga menjadi sebuah kesepakatan atau perjanjian bersama yang sudah tentu didalamnya juga terdapat peraturan dan tata tertib agar organisasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Menjalankan proses administrasi dalam suatu organisasi tidak terlepas dari adanya unsur manajemen, sebab manajemen merupakan penggerak agar tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama yang baik yang didasarkan atas dasar rasionalitas tertentu guna untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi Publik (Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik, manajemen Publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan.

Menurut Harbani Pasalong (2007:8) Administrasi Publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga-lembaga dalam memenuhi kebutuhan publik, secara efisien dan efektif.

3. Konsep Organisasi

Dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi, manajemen merupakan salah satu alat dalam pencapaian tersebut. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan (organisasi), karyawan, pegawai dan masyarakat.

Zulkifli (2005;73) yang mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Zulkifli (2005;131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga sejenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, lingkungan eksternal.

Selanjutnya untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat berjalan dengan efisien sebagaimana yang sudah digariskan, maka diperlukan proses administrasi yang baik pula karena administrasi merupakan kunci bagi keberhasilan suatu organisasi, yakni dalam menyoro ti dampak keputusan atau kebijaksanaan yang diambil ataupun tidak diambil oleh para administrator.

Beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep organisasi merupakan wadah pelaksanaan untuk bekerjasama yang mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

4 Konsep Organisasi Publik

Menurut Fahmi (2013:1) adalah organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta

mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya, Sedangkan Menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar, yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayananan Publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koorporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

5. Konsep Manajemen

George R. Terry dalam Zulkifli (2009:16) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu menurut Hasibuan (2006:2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Erni (2010:5) manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Lain halnya yang dikemukakan oleh Nickels, McHugh dan McHug dalam Erni (2010:6)

yang menatakan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian orang-orang serta sumberdaya organisasi lainnya.

Erni (2010;8) menyebutkan bahwa fungsi manajemen antara lain:

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisasian)
3. Directing (Pengimplementasian)
4. Controlling (Pengendalian dan Pengawasan)

Dari berbagai pengertian manajemen yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan manajemen adalah sebagai suatu proses, serangkaian tindakan, kegiatan atau pekerjaan yang mengarah kepada pencapaian sasaran tertentu melalui orang lain. Dengan demikian, manajer adalah orang yang senantiasa memikirkan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan serangkaian kegiatan atau tindakan tersebut, maka dibutuhkan pilar-pilar sebagai tiang penjaga atau sering disebut sebagai fungsi manajemen, bagaimana menjalankan pilar ini maka orang yang menjalankannya disebut manajer.

6. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana Pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman,2002;70).

Sedangkan menurut BintoroTjokroadmudjoyo pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek (dalam Rahardjo,2011).

Dari pengertian-pengertian yang telah dikumpulkan dapat ditarik kesimpulan memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

7. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau kelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksana usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Friedrich dalam Lubis,2007;7).

Menurut Anderson dalam Nurcholis (2007;263) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Thomas R.Dye dalam Nurcholis (2007;264) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Selanjutnya Kebijakan Publik menurut Nugroho (2012; 14) mengatakan bahwa kebijakan publik dibentuk untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang dilakukan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu.

8. Konsep Implementasi Kebijakan

Apabila dilihat secara harfiah ilmu kebijakan publik terjemahan dari kata “policy science” tokoh atau penulis kebijakan publik adalah “Dunn, Jones, Friedman” mereka menggunakan kata “publik policy, public dan policy analysis” dengan pengertian yang berbeda .

Di Indonesia menggunakan istilah “kebijaksanaan dan kebijakan” dari terjemahan policy yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini disejalankan dengan pengertian “public” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Selanjutnya dapat dilihat definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Latief (2005;88) yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu, perilaku seseorang baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Koryati (2005;7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang dilaksanakan secara jelas.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64)”.

Winarno (2007;144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Dimana implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program.

Sementara itu Nugroho (2004;158) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yang memiliki rangkaian kegiatan program intervensi, proyek intervensi, kegiatan intervensi, umpan balik (masyarakat/publik).

Model Edward III dalam Widodo (2009;96) menetapkan ada enam indikator yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Sikap Birokrasi
- d. Struktur Organisasi

9. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2011:10) “ Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur Hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, Karyawan dan masyarakat”.

Selanjutnya Menurut Nawawi (2011) Mengatakan ada 3 Pengertian Sumber Daya Manusia yaitu:

- 1) Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu lembaga (personil,tenaga kerja, pekerja atau karyawan)
- 2) Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- 3) Sumber Daya Manusia potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/material) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi.

Menurut Jaja Jahari & M. Sobry Sutikno (2008:7) tujuan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

Salah satu alasan utama berdirinya organisasi adalah untuk mencapaitujuan .Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai macam tugas. Berbagai macam tugas itu tentu saja berbeda-beda, dan tugas-tugas itu harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk membantu organisasi mencapai tujuan. Supaya tugas-tugas itu bisa efektif .

10. Konsep Evaluasi

Menurut Lestar dan Stewart (2000:126), evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Sedangkan Menurut William N. Dunn (2003:608), istilah evaluasi mempunyai arti yaitu secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan menilai (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai satuan atau manfaat hasil kebijakan.

Adapun Fungsi evaluasi menurut William N, Dunn (2003:609), adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai *kinerja kebijakan*, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Didalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu yang telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemeliharaan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menyatakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dan masalah yang dituju.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk *perumusan masalah* dan *rekomendasi*. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh dengan menu jukkan bahwa tujuan dan target perlu di definisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan

menunjukkan bahwa alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Menurut William N. Dunn (2003:610), kriteria evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Persatuan
5. Responsivitas
6. Ketetapan

Evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berurusan dan berusaha untuk menanyakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur se-objektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung suatu rencana.

Firman B. Aji dan Martin sirait (1990:30), evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah dicapai hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil-hasil evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan kembali.

Taliziduhu Ndara (2003;201), mengemukakan evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta analisis hasilnya. Ada 3 (Tiga) model evaluasi diantaranya sebagai berikut:

1. Model Before-After, yaitu pembanding antar sebelum dan sesudah tindakan (perlakuan,treat). Tolak ukurnya adalah kondisi before,

2. Model Das sollen-das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah das Sollen.
3. Model Kontrol kelompok-kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Dalam Zaini Ali dan Raden Imam Al Hafis (2015:97-98), menjelaskan bahwa secara umum, terdapat 4 (empat) pokok dari kegiatan evaluasi, yakni pertama, terfokus pada nilai. Kegiatan evaluasi difokuskan pada nilai dari suatu kebijakan, atau penilaian atas keterpenuhan kepentingan atau manfaat dari keberadaan suatu program. Kegiatan evaluasi ini tidak sekedar mengumpulkan informasi tentang apakah seluruh tindakan telah dilaksanakan, tidak juga mengenai hasil dari suatu kebijakan. Lebih jauh dari itu evaluasi mencakup aspek ketercapaian sasaran dan tujuan kebijakan.

Kedua, interdependensi antara fakta dan nilai. Untuk menyatakan bahwa sebuah kebijakan telah mencapai tujuan optimal bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan, kegiatan evaluasi, membutuhkan fakta-fakta yang memadai yang menjelaskan bahwa hasil-hasil yang telah didapat benar-benar merupakan akibat dari dilakukannya tindakan kebijakan. Oleh karenanya, kegiatan evaluasi harus berdasar pada hasil-hasil pemantauan.

Ketiga, berorientasi pada masa kini dan masa lampau. Penelitian atas hasil kebijakan lebih diarahkan pada tuntutan-tuntutan masa kini dan masa lalu. Oleh karenanya kegiatan evaluasi bersifat induktif.

Keempat, bernilai pada ganda. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan evaluasi mempunyai kualitas ganda, disatu sisi dapat di pandang sebagai tujuan, dan disisi yang lain, dapat dipandang sebagai cara. Disamping itu evaluasi dapat juga dipandang, yakni keberadaannya diperlukan untuk tujuannya sendiri, dan sekaligus, yakni pencapaian tujuannya mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan kegiatan lainnya.

Dari definisi-definisi mengenai evaluasi diatas dapat penulis simpulkan bahwa evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan dengan mengukur hasil-hasil yang telah dilaksanakan sebelum dan kemudian dilakukan perbaikan guna untuk meningkatkan aktivitas dalam melakukan pekerjaan dimasa yang akan datang dapat bertindak, bertanggung jawab , kreatif dan seefensien mungkin.

11. Koordinasi

Menurut Manullang (2008:72), Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Adapun tujuan koordinasi sangat menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan, tetapi apabila koordinasi tidak melaksanakan atas departemen dan pembagian kerja akan menimbulkan organisasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah,koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacuan,percekcokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diseleraskan serta diarahkan untuk pencapain tujuan organisasi
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan, Hasibuan (2009:86).

12. Konsep Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekononi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang yang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Ada beberapa indikator mengenai kemiskinan sebagai berikut:

1. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat disuatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya Jumlah pendapatan perkapita (*income per capita*) dihitung besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk disuatu daerah untuk kurun waktu 1 Tahun (Todaro,1997:437).

Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan

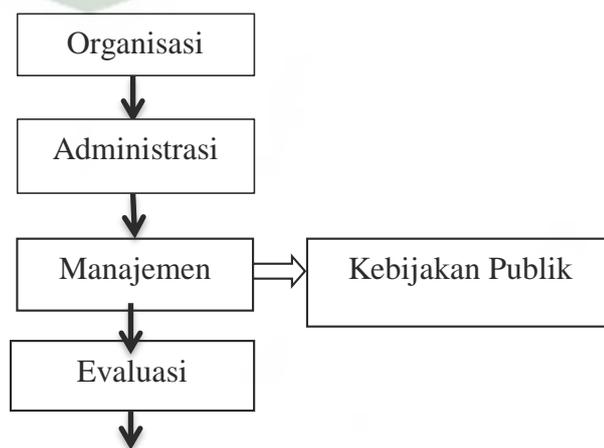
pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin.

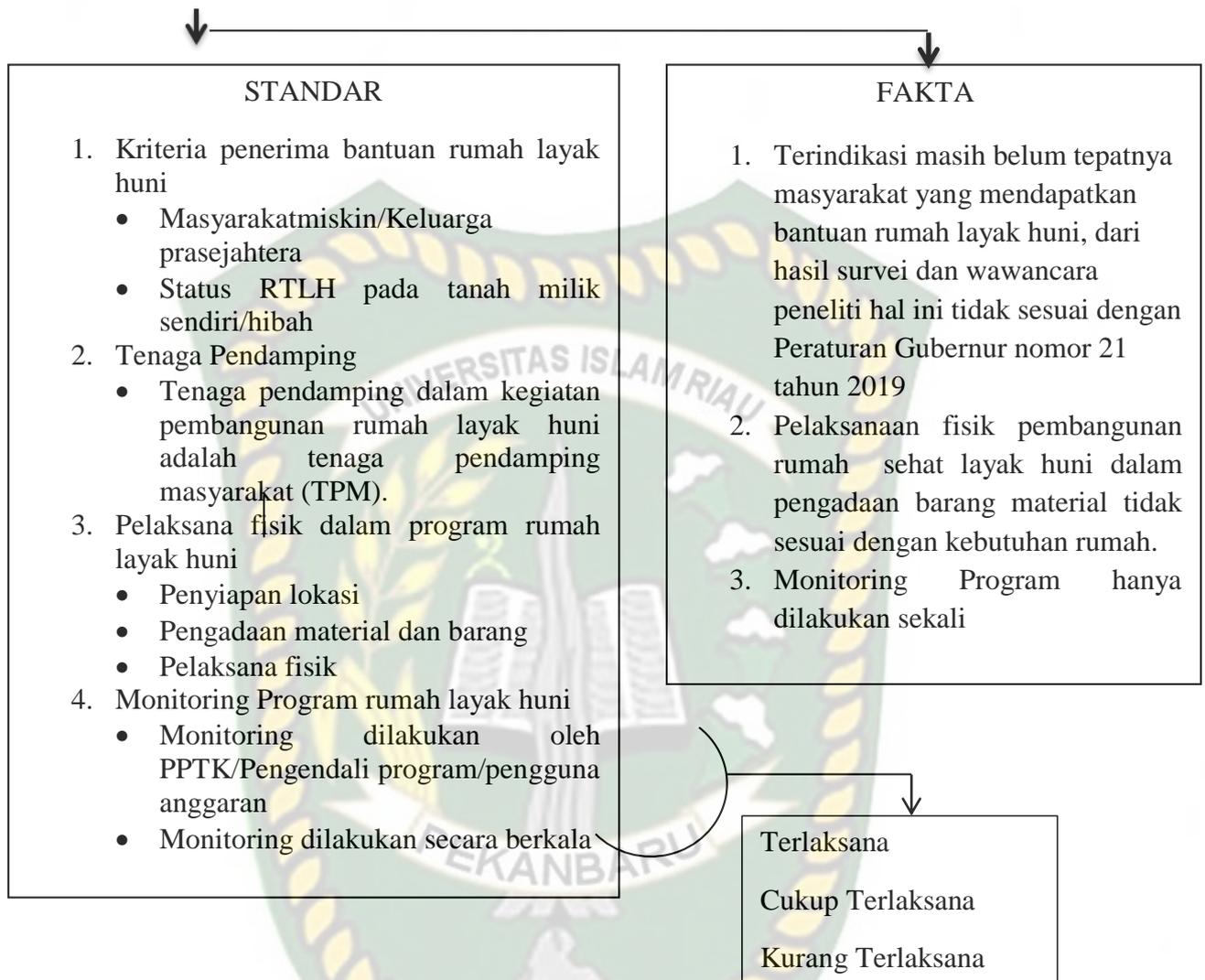
2. Garis kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan (BPS,2004). Pada Prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat disuatu daerah.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.I : Model Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu





C. Hipotesis

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Diduga kurang kurang terlaksananya Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, yang ditentukan oleh indikator implementasi program yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat .

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah melaksanakan penelitian dan untuk menetralsir kesalahan paham dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu diketahui dan dijelaskan beberapa konsep operasional.

Defenisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah untuk melakukan kegiatan administrasi yang terdiri dari kumpulan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
3. Manajemen adalah suatu proses yang digunakan sebagai pengatur jalannya administrasi dalam organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan lainnya.
4. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
5. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan adalah usaha pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan

melihat komunikasi untuk penyebar informasi, sumberdaya pelaksana, pemberian pemerintah dan struktur organisasi.

6. Indragiri Hulu adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia.
7. Rumah Sehat Layak Huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang layak huni yang memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.
8. Memiliki lahan tempat lokasi pembangunan dalam penelitian ini adalah lahan yang dimiliki masyarakat untuk pembangunan bantuan layak huni.
9. Cacat jasmani dalam penelitian ini masyarakat cacat jasmani yang dimiliki yang tidak layak huni.
10. Memiliki rumah yang layak huni dalam penelitian ini adalah masyarakat yang diberikan bantuan rumah layak huni yang sebelumnya memiliki yang tidak layak huni

E. Operasional Variabel

Tabel II.I : Organisional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Menurut Ndraha Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.	Evaluasi	1. Kriteria Penerima Program Rumah Layak Huni	a. Rumah Tangga miskin/keluarga prasejahtera b. Masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni c. Status Kepemilikan rumah atas tanah milik sendiri	Baik Cukup Baik Kurang Baik

(Ndraha 2003:201).	2.Tenaga Pendamping	a. TPM melalui open rekrutmen b.Pokmas Berkoordinasidengan TPM c.Koordinasi dengan RT dan RW	Baik Cukup Baik Kurang Baik
	3.Pelaksanaan fisik dalam program rumah layak huni	a. Pembangunan Rumah sesuai dengan kualitas dan kuantittas b.Rumah layak huni dibangun ditanah penerima bantuan c. Bantuan sesuai dengan standar layak huni	Baik Cukup Baik Kurang Baik
	4.Monitoring program rumah layak huni	a.PPTk mengawasi pembangunan b.Monitoring dimulai dari pencairan c.Pembangunan Rumah sesuai waktu	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik Pengukuran yang digunakan dalam Penelitian ini adalah skala likert.Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena yang terjadi.Dengan skala likert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebutdijadikan sebagai item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan (Sugiono,2003 :107).

Setelah dikemukakan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian maka penulis menetapkan teknik pengukuran variabel dan indikator variabel evaluasi, maka teknik tersebut sebagai berikut :

1. Baik, dengan bobot nilai 3
2. Cukup Baik, dengan bobot nilai 2
3. Kurang Baik, dengan bobot nilai 1

Untuk mengetahui hasil penilaian dengan menggunakan teknik skoring dari skor tertinggi, terendah dan interval kelas, dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

Skor tertinggi = Jumlah responden \times jumlah item pertanyaan \times nilai tertinggi

Skor terendah = Jumlah responden \times jumlah item pertanyaan \times nilai terendah

Interval = $\frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{Skala pengukuran}}$

Pengukuran yang digunakan untuk penilaian pada persentasi (%) dapat dikategorikan “Terlaksana” dengan persentasi 67%-100%, untuk kategori “Cukup Terlaksana” dengan persentasi 34%-66%, untuk kategori “Kurang Terlaksana” dengan persentasi <34%

Teknik pengukuran data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga katagori, yaitu Baik, Cukup Baik, Kurang Baik. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Huludapat dilakukan dengan pengukuran sebagai berikut:

- a. Kriteria Penerima Bantuan Rumah Layak Huni

Baik : Apabila Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalankan empat indicator yang ada atau jawaban responde pada katogori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalankan dua hingga tiga indicator yang ada atau jawaban responden pada katagori terlaksana dengan persentas 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan dan Pemukimantelah menjalankan satu hingga dua indikator yang ada atau jawaban responden pada katagori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%

b. Tenaga Pendamping

Baik : apabila Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalankan
empat indicator yang ada atau jawaban responde
pada katogori terlaksana dengan persentase antara 67%
- 100%

Cukup Baik: apabila Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan
Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Di Desa
Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri
Hulu telah menjalankan dua hingga tiga indicator
yang ada atau jawaban responden pada katagori
terlaksana dengan persentas 34% - 66%

Kurang Baik : apabila Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan
Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Di Desa
Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri
Hulu telah menjalankan satu hingga dua indikator
yang ada atau jawaban responden pada katagori
terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%

c. Pelaksana fisik dalam program bantuan rumah sehat layak huni

Baik : apabila Evaluasi Pelaksanaan Proram Bantuan
Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Jatirejo Kecamatan
Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu telah

menjalankan empat indicator yang ada atau jawaban responden pada katogori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%

Cukup Baik : apabila Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Didesa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalankan dua hingga tiga indicator yang ada atau jawaban responden pada katagori terlaksana dengan persentas 34% - 66%

Tidak Baik : apabila Pelaksanaan Program Bantuan rumah sehat layak huni oleh Dinas Perumahan kawasan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu permukiman telah menjalankan satu hingga dua indikator yang ada atau jawaban responden pada katagori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%

d. Monitoring dalam program bantuan rumah sehat layak huni

Baik : apabila Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalankan empat indicator yang ada atau

jawaban responde pada katogori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%

Cukup baik : apabila Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalankan dua hingga tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada katagori terlaksana dengan persentas 34% - 66%

TidakBaik : apabila Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak HuniOleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalankan satu hingga dua indikator yang ada atau jawaban responden pada katagori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian survey deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada dilatar belakang masalah yang dipaparkan penulis, maka jelas penelitian ini dilakukan dengan mengambil dan memperoleh data di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiono;2010,80). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perumahan, Ketua Pelaksana, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Keluarga.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian tentang Evaluasi Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

NO	Jenis Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Dinas Perumahan Pemukiman	1	1	100%
2	Kepala Bagian Perumahan	1	1	100%
3	Seksi Pendataan	1	1	100%
4	Kepala Desa	1	1	100%
5	Sekretaris	1	1	100%
6	Ketua Pelaksana POKMAS	1	1	100%
7	Anggota POKMAS	4	4	50%
8	Kepala Keluarga	5	5	50%
Total		15	15	50

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2019

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah karekteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah menggunakan *teknik sensus* atau sampel jenuh dan *teknik Purposive sampling*.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai

Berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan teknik pengambilan data yang telah ditentukan penulis yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Bantuan

- b. Data sekunder merupakan sumber data informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip, literature serta laporan tertulis yang berhubungan dengan Pelaksanaan Program Bantuan

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi adalah teknik pengambilan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, pendekatan langsung kepada objek penelitian serta menganalisisnya guna memperoleh berbagai data terutama data sekunder yang terkait dengan penelitian ini dengan alasan untuk mengetahui situasi dan kondisi pada objek penelitian.
2. Wawancara adalah mengajukan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Mekanis mewawancara dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar wawancara kemudian mengajukannya langsung kepada Kepala Bidang Perumahan untuk mendapatkan jawaban yang relevan.
3. Kuisioner adalah mengajukan daftar pertanyaan kepada responden yang selanjutnya hasil jawaban responden digunakan untuk mendapatkan data yang objektif dari responden dengan cara membuat beberapa alternative jawaban untuk dijawab sesuai dengan keadaan responden.
4. Dokumentasi yaitu data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah

yang akan di teliti,teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian, seperti pengamatan atau mengumpulkan artikel-artikel berkaitan dengan penelitian, seperti pengamatan artikel-artikel berkaitan dengan penelitian.

G. Teknis Analisis Data

Setelah data yang diperlukan oleh penulis tersebut terkumpul maka data-data tersebut akan diolah dengan melakukan pengelompokan data yang sesuai dengan jenis-jenis data yang diperoleh. Diolah lalu dipelajariserta dilakukan analisis menurut pemikiran penulis secara deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh berdasarkan dengan kenyataan dilapangan antara standar

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu penelitian tentang Studi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu . Seperti rincian waktu kegiatan yang tertera pada table:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan kawasan Pemukiman Pertahanan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

No	JenisKegiatan	BulandanMingguKe																			
		Januari				Februari				Maret				April				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan up																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Jatirejo

1. Sejarah Desa

Desa Jatirejo adalah nama satu wilayah dikecamatan Pasir Penyukabupaten IndragiriHulu.Pada awal mulanya Desa Jatirejo terbentuk pada tahun 1940 yakni dengan nama perkampungan Tjerutjup yang dihuni oleh suku anak talang darat yang dipimpin oleh seorang penghulu bernama yaitu Atan Poetih yang pada saat itu sangat terkenal dan disegani diwilayah Indragiri. Sehingga semakin bertambahnya penduduk yang datang dari beberapa beberapa daerah termasuk salah satunya pulau Jawa, dan pada tahun 1963 sesuai dengan hasil kesepakatan dari para tokoh masyarakat. Nama Tjerutjup di ubah menjadi Desa Jatirejo. Menurut tokoh masyarakat yang masih hidup yakni Tuk Saleh, Jati yang berasal dari kata kayu jati yang terkenal dan sangat kuat dan tahan lama sedangkan kata Rejo yang artinya ramai.

Perkembangan sejarah telah menentukan, Kepala desa pertama yaitu Atan Poetih Masa Jabatan pada tahun 1940-1966,penunjukan langsung dari tokoh masyarakat setempat. Kepala desa kedua Moh.Nur masa jabatan dimulai pada tahun 1966-1968Kepala desa ketiga ABD. Manap masa jabatan 1968-1972.. Kepala desa ke empat Athonimasa jabatan 1972-2002,Kepala desa ke lima Ilyas masa jabatan 2002-2003. Kepala desa Ke enam Juara masa

jabatan 2003 sampai 2007. Kepala desa ke tujuh Kusmin masa jabatan 2007-2015. Kepala Desa ke delapan masa jabatan 2015 s/d saat ini.

Desa Jatirejo terletak diwilayah kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rimpian
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasir Keranji
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serumpun Jaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Air Putih

2. Keadaan Demografi

a. Kondisi Umum

Desa Jatirejo merupakan salah satu Desa dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Pasir Penyus dengan jumlah penduduk sebanyak 473 KK atau 1.892 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2015.

b. Kondisi Iklim

Iklim Desa Jatirejo, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat maupun kesuburan tanah.

c. Letak dan Luas Wilayah

Desa Jati Rejo terletak didataran tinggi yang berjarak +10,0 Km ke arah timur dari kota kecamatan, mempunyai luas wilayah 4.315 Ha

3. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2017, Desa Jati Rejo mempunyai jumlah penduduk 1.322 jiwa, yang tersebar di 3 (tiga) Dusun (Dusun I, Dusun II, dan Dusun III) dan 6 RW, serta 13 RT Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala keluarga : 358 KK
2. Laki-laki : 681 Jiwa
3. Perempuan : 641 Jiwa
4. Jumlah : 1322 Jiwa

b. Tingkat Pendidikan

1. SD/MI : 164 orang
2. SLTP/MTS : 80 orang
3. SLTA/MA : 79 orang
4. S1/diploma : 23 orang
5. Pra sekolah : 125 orang

c. Lembaga pendidikan

1. Gedung Tk/PAUD : 1
2. SD/MI : 2 unit
3. SLTP/MI : -
4. SLTA/MA : -
5. PTA/MDA/TPQ : 7 unit

d. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 310 KK
2. Pengguna air PAH : - KK
3. Pengguna sumur pompa : 161 KK
4. Pengguna sumur hidran umum : - KK
5. Pengguna air sungai : 7 KK

e. Keagamaan

Data keagamaan desa bongkal malang tahun 2015 jumlah pemeluk:

- Islam : 1.250 orang
- Katolik : 13 orang
- Katholik : 17 orang
- Hindu : -
- Budha : -

Data tempat ibadah dan jumlah tempat ibadah :

- Masjid : 3 unit
- Musholla : 3 unit

- Gereja : -
- Pura : -
- Vihara : -

a. Kondisi ekonomi

a) Pertanian

Jenis tanaman :

1. Padi sawah : 0 ha
2. Padi ladang : 0 ha
3. Jagung : 0 ha
4. Palawija : 3 ha
5. Tembakau : 0 ha
6. Tebu : 0 ha
7. Kakao/coklat : 0,5 ha
8. Sawit : 750 ha
9. Karet : 40 ha
10. Kelapa : 1 ha
11. Kopi : 0 ha
12. Singkong : 0 ha
13. Lain-lain : 4 ha

b) Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 60 ekor
2. Sapi : 100 ekor
3. Kerbau : - ekor
4. Ayam : 3.732 ekor
5. Itik : 130 ekor
6. Burung : 50 ekor
7. Lain-lain : 40 ekor

c) Perikanan

1. Kolam ikan : 6,75 ha
2. Tambak udang : - ha
3. Lain-lain : - ha

d) Struktur mata pencaharian

Jenis pekerjaan :

1. Petani : 131 orang
2. Pedagang : 151 orang
3. PNS : 11 orang
4. Tukang : 9 orang
5. Guru : 11 orang
6. Bidan/perawat : 3 orang
7. Tni/polri : 2 orang
8. Pensiunan : 1 orang
9. Sopir/angkutan : 20 orang
10. Buruh : 4 orang
11. Swasta : 91 orang

B. Kondisi Pemerintahan Desa

a) Pembagian wilayah desa

Desa bongkal malang terbagi ke dalam 4 dusun terdiri dari :

1. Dusun I : jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun II : jumlah 2 RW dan 4 RT
3. Dusun III : jumlah 2 RT dan 5 RT

b) Struktur organisasi pemerintahan desa

1. Lembaga pemerintah desa

Jumlah aparatur desa :

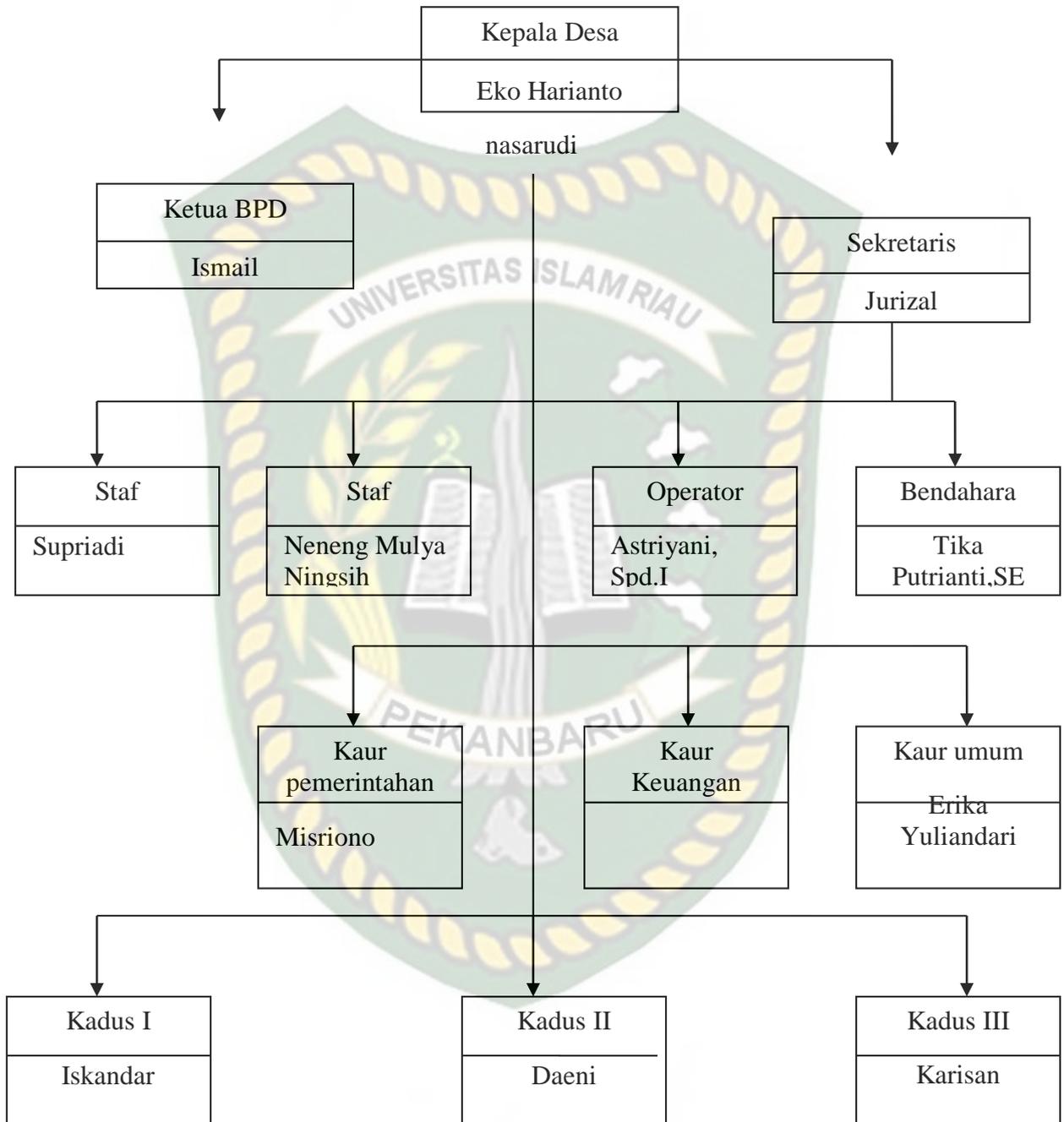
- 1) Kepala desa : 1 orang
- 2) Sekretaris desa : 1 orang
- 3) Perangkat desa : 8 orang

2. Lembaga permusyawaratan desa (BPD)

3. Lembaga kemasyarakatan

- 1) LPM : 1 Kelompok
- 2) PKK : 1 Kelompok
- 3) Posyandu : 1 Kelompok
- 4) Pengajian : 4 Kelompok
- 5) Arisan : 3 Kelompok
- 6) Simpan Pinjam : 5 Kelompok
- 7) Kelompok Tani : 3 Kelompok
- 8) Gapoktan : 1 Kelompok
- 9) Karang Taruna : 1 kelompok
- 10) Remaja Masjid : 1 kelompok
- 11) BUMDes : 1 Unit
- 12) Rukun Tetangga: 13 RT
- 13) Rukun Warga : 6 RW
- 14) Kelompok Posbindu : 1 Kelompok
- 15) Kelompok Remaja Mesjid : 1 Kelompok
- 16) Kelompok Serikat Kematian : 1 Kelompok

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : Kantor Desa Bongkal Jati Rejo kecamatan Pasir Penyau 2019

C. Masalah dan potensi desa

Masalah desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools partisipatory rural apraisal (PRA) yakni peta sosial desa, kalender musim dan diagram/bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum desa bongkal malang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bidang infrastruktur desa/sarana prasarana
 1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan setapak, jalan tanah, dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa
 2. Keberadaan tiang dan jaringan listrik belum terpenuhi
 3. Kebutuhan akan box culvert belum terpenuhi
 4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
 5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir saat hujan.
 6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
 7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai
 8. Masih ada fasilitas sarana ibadah yang belum memadai
- b. Bidang pendidikan
 1. Bangunan pelengkap (insfrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, sound system, MCK, komputer dan lain-lain)
 2. Pustaka desa belum ada

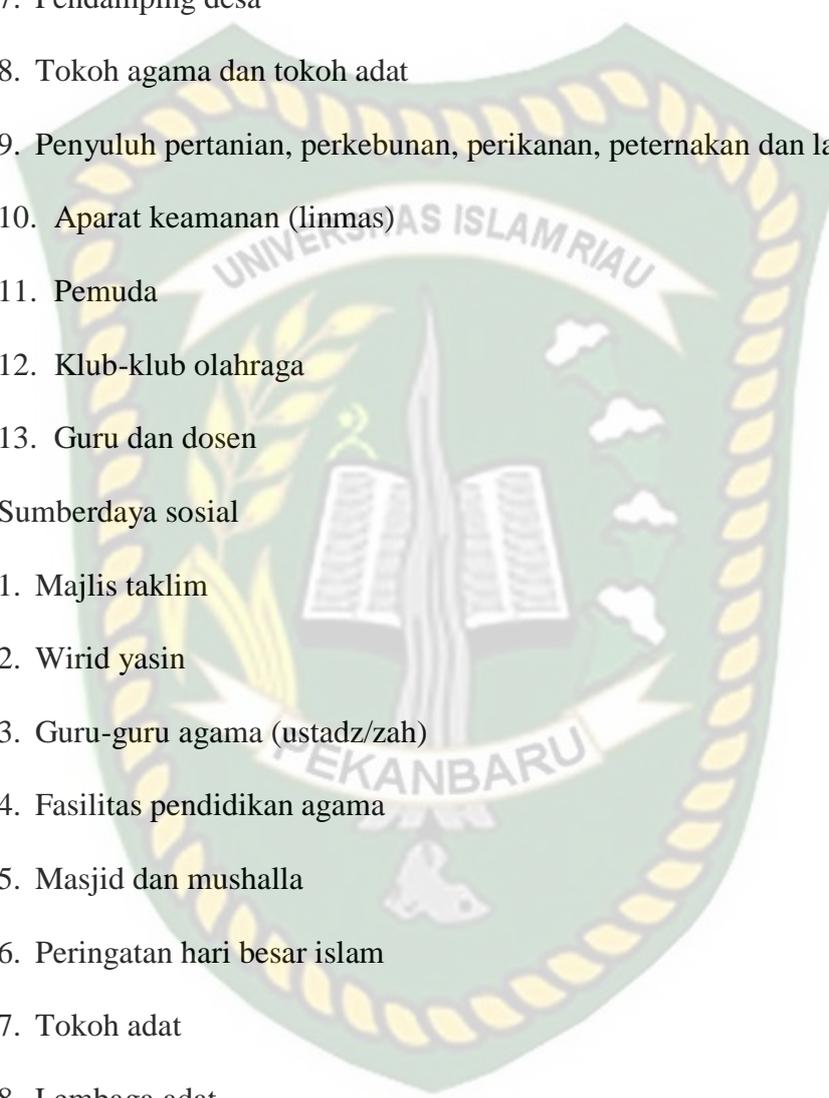
3. Minat baca masyarakat kurang
 4. honor guru non PNS masih kurang
 5. beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum merata
 6. belum terbentuknya PKBM (kejar paket)
 7. masih ada anak putus sekolah
 8. masih banyak masyarakat buta huruf
- c. bidang ekonomi
1. belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
 2. lembaga ekonomi (SPP DAN UED) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
 3. belum terlaksananya pelatihan-pelatihan dibidang peningkatan usaha dan pasca panen
 4. penggalian PAD desa belum optimal
 5. rendahnya harga komoditas karet yang sejak 5 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis
 6. lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum berjaladengan lancar
- d. bidang pemerintahan
1. terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan
 2. pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
 3. pelayanan masyarakat masih belum optimal
 4. regulasi desa belum dijalankan dengan baik
 5. administrasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal

6. insentif yang diterima oleh aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
7. kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pembinaan kepada pemerintah desa

D. Potensi Desa

Potensi Desa adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

- a. Potensi sumberdaya alam
 1. Lahan kosong
 2. Belukar
 3. Pasir
 4. Batu
 5. Perkebunan karet
 6. Perkebunan sawit
 7. Palawija
 8. Tanah timbun
 9. Peternakan
- b. Potensi sumberdaya manusia
 1. Aparatur desa
 2. BPD
 3. Kelembagaan desa
 4. Kader desa

- 
5. Kader posyandu
 6. Kader PKK
 7. Pendamping desa
 8. Tokoh agama dan tokoh adat
 9. Penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan lain-lain
 10. Aparat keamanan (linmas)
 11. Pemuda
 12. Klub-klub olahraga
 13. Guru dan dosen
- c. Sumberdaya sosial
1. Majelis taklim
 2. Wirid yasin
 3. Guru-guru agama (ustadz/zah)
 4. Fasilitas pendidikan agama
 5. Masjid dan mushalla
 6. Peringatan hari besar islam
 7. Tokoh adat
 8. Lembaga adat
- d. Sumberdaya ekonomi
1. Lahan pertanian
 2. Lahan perkebunan
 3. Kolam ikan
 4. SPP Dan UED

5. Lembaga dana bergulir
6. Pedagang dan swasta
7. Pasar desa
8. Usaha galian C
9. SPBU
10. CV/PT

E. Rencana pembangunan jangka menengah desa

a. Visi dan misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa bongkal malang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa bongkal malang seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan dikecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa bongkal malang.

1. Visi desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi desa bongkal malang adalah “ terwujudnya masyarakat desa bongkal malang yang sejahtera, maju, mandiri, bermartabat dan agamais dengan mengembangkan potensi sumberdaya tahun 2020”.

2. Misi desa

Untuk mencapai tujuan dari visi di atas maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat serta perkebunan
- b. Membangun sarana dan prasarana insfrastruktur yang mampu membuka daerah terisolasi dan mengembangkan potensi daerrah
- c. Perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- e. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat
- f. Meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa
- g. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, dan manajemen usaha masyarakat

F. Kebijakan pembangunan desa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desadengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

agar tujuan pembangunan benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang

berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

1. Arah kebijakan pembangunan desa

a. Arah pengelolaan pendapatan desa

- 1) Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat
- 2) Identifikasi sumber pendapatan asli desa (PAD)
- 3) Menyusun regulasi berupa peraturan desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa.
- 4) penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa
- 5) semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggung jawaban kepala desa kepadamasyarakat

b. arah kebijakan pembangunan dan keuangan desa

- 1) meningkatkan pendapatan masyarakat
- 2) meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel
- 3) belanja kepala desa dan perangkat desa
- 4) operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM)
- 5) isentif dusun, RW, dan RT seta kelembagaan desa lainnya
- 6) tunjangan operasional BPD
- 7) program operasional pemerintahan desa
- 8) program pelayanan dasar infrastruktur

- 9) program pelayanan pertanian dan perkebunan
- 10) program pelayanan dasar kesehatan
- 11) program pelayanan dasar pendidikan
- 12) program penanggulangan kemiskinan
- 13) program penyelenggaraan pemerintah desa
- 14) program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparaturnya, dan badan permusyawaratan desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
- 15) program ekonomi kerakyatan yang produktif
- 16) program peningkatan pelayanan masyarakat
- 17) program dana bergulir, agribisnis, dan manajemen usaha
- 18) program pengelolaan tata ruang desa
- 19) program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
- 20) program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah
- 21) program pemberdayaan lembaga adat
- 22) program kerja sama desa dan antar desa
- 23) program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

c. kebijakan umum anggaran

pemerintah desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDDesa.

2. Program pembangunan desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari visi dan misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan review terhadap RKP dan RPJM desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum program pembangunan desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

1. meningkatkan pendapatan masyarakat
2. meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel
3. belanja kepala desa dan perangkat desa
4. operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM)
5. isentif dusun, RW, dan RT seta kelembagaan desa lainnya
6. tunjangan operasional BPD
7. program operasional pemerintahan desa
8. program pelayanan dasar infrastruktur
9. program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. program pelayanan dasar kesehatan
11. program pelayanan dasar pendidikan
12. program penanggulangan kemiskinan
13. program penyelenggaraan pemerintah desa
14. program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. program peningkatan pelayanan masyarakat

17. program dana bergulir, agribisnis, dan manajemen usaha
18. program pengelolaan tata ruang desa
19. program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah
21. program pemberdayaan lembaga adat
22. program kerja sama desa dan antar desa
23. program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

G. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan desa selama 6 tahun.
2. Bersama masyarakat desa, pemerintah desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotong royongan dalam membangun desa dengan asas-asas keadilan, partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab.
3. Menyusun langkah-langkah kongkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada.
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa.
6. Melakukan pemanfaatan dan pelestarian kegiatan.
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan terhadap responden yang digunakan sebagai sampel, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner serta observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas responden berguna untuk mengetahui berapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi respnden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya identitas responden Desa Jatirejo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	12	66,66%
2	Perempuan	3	33,33%
	Jumlah	15	100 %

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2019

Dasi tabel V.1 diatas terlihat bahwa dalam penelitian ini responden penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas Perumahan, Bidang Perumahan, sub bagian pendataan, Kepala Desa, Sekretaris, Ketua Pokmas, Anggota POKMAS dan masyarakat lebih banyak didominasi oleh laki-laki yaitu berjumlah 12orang atau sama dengan 66,66% dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 3orang atau sama dengan 33,33% kemudian akan dijelaskan pembagian responden berdasarkan kelompok umur. Dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Responden penelitian berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	30-40	3	20%
2	41-50	6	40%
3	51-60	5	33,33%
4	>60	1	6,67%
	Jumlah	15	100 %

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2019

Dari tabel V.2dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan adalah adalah berusia 41-50 tahun yaitu sebanyak 6 orang atau sebanyak 40 % dan diikuti oleh usia diantara 51-60 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau 33,33% selanjutnya untuk usia 30-40 yaitu sebanyak 3 orang atau 20% dan usia >60 sebanyak 1 orang atau6,67%. Dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori usia produktif dalam pengumpulan data responden.

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kuisisioner ini juga terdapat identitas berupa pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 3 Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	7	46,67%
2	SMP	1	6,67%
3	SMA	3	20%
4	SARJANA	4	26,67%
	Jumlah		100%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah SD sebanyak 7 orang atau selanjutnya tamatan 4 orang sebanyak orang atau pendidikan SMA Sebanyak 3 orang atau dan SMP sebanyak 1 orang atau . Dari data tersebut dapat dilihat latar pendidikan responden dalam penelitian ini yang lebih banyak adalah tamatan SD dan dikategorikan cukup baik sehingga jawaban yang diberikan juga cukup baik.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyut Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada bagian bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan responden terhadap Indikator-indikator penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyut Kabupaten Indragiri Hulu.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Sehingga demikian indikator yang digunakan sebagai bahan analisa dengan melihat bagaimana pencapaian terhadap manfaatnya bagi kepentingan umum, kemudian dengan melihat tingkat efisiensi pelaksanaan program bantuan

rumah sehat layak huni tersebut. Adapun indikator terdiri 4 Kriteria Penerima bantuan , Tenaga Pendamping, Pelaksana Fisik, Monotoring Program.

a. Kriteria Penerima Program Bantuan

Adapun sebagaimana penulis terhadap tanggapan responden terhadap kriteria penerima program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 :Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kriteria Penerima Bantuan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1	Masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni	12 (36)	0 (0)	0 (0)	12 (36)
2	Masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah	12 (36)	0 (0)	0 (0)	12 (36)
3	Status Kepemilikan rumah atas tanah milik sendiri	12 (36)	0 (0)	0 (0)	12 (36)
Jumlah		108	0	0	108
Kategori					

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor tertinggi} = 3 \times 12 = 36$$

$$\text{Skor indikator} = 36 \times 3 = 108$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{108}{108} \times 100 = 100\%$$

Dapat diketahui pada indikator pertama yang terdiri dari 3 item penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan Baik pada item penilaian yang

pertama yaitu sebanyak 12 orang dan menyatakan Cukup Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Pada item penilaian kedua yaitu masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak 12 orang dan menyatakan Cukup Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Pada item penilaian ketiga yaitu status kepemilikan tanah dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak 12 orang dan menyatakan Cukup Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Kriteria Penerima Bantuan Program di Desa Jatirejo sebanyak 100% dengan skor 108 dan berada pada 67-100%, sehingga dapat dikatakan BAIK. Jadi responden menyatakan bahwa Kriteria Penerima Bantuan Program dalam pelaksanaan Bantuan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus sudah Terlaksana, Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arsyad (18/11/2019) jam WIB, Jabatan sebagai Ketua POKMAS di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu dan hasil wawancara sebagai berikut:

“ menurut beliau, bahwa kegiatan pelaksanaan program bantuan rumah sehat layak huni yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik, karena penerima bantuan program ini diberikan kepada masyarakat miskin yang berhak menerimanya. Sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang sudah ditentukan.”

Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden yang berjumlah sebanyak 14 orang responden dengan hasil pengamatan peneliti tentang kriteria penerima program bantuan sudah terlaksana yang sesuai dengan tanggapan responden bahwasannya seperti masyarakat menerima bantuan masyarakat miskin yang dilakukan sudah terlaksana.

Dari uraian data diatas, data hasil wawancara serta hasil pengamatan peneliti dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan kriteria penerima bantuan dilakukan sudah terlaksana. Walaupun masih terdapat kekurangan sehingga indikator tahap penyusunan rencana menurut penulis berada pada rentang berhasil.

Selanjutnya tanggapan responden sebagai Pegawai Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berjumlah 2 responden terhadap indikator kriteria penerima bantuan yang terdiri dari 3 item penilaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Kriteria Penerima Bantuan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1	Masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni	2 (6)	0 (0)	0 (0)	2 (6)
2	Masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah	2 (6)	0 (0)	0 (0)	2 (6)
3	Status Kepemilikan rumah atas tanah milik sendiri	2 (6)	0 (0)	0 (0)	2 (6)
Jumlah		18	0	0	18

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas teknik dan penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor tertinggi} = 3 \times 2 = 6$$

$$\text{Skor Indikator} = 6 \times 3 = 24$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{18}{24} \times 100 = 75\%$$

Dapat diketahui pada indikator pertama yang terdiri dari 3 item penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan Baik pada item penilaian yang pertama yaitu sebanyak 2 orang dan menyatakan Cukup Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Pada item penilaian kedua yaitu masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak 2 orang dan menyatakan Cukup Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Pada item penilaian ketiga yaitu status kepemilikan tanah dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak 2 orang dan menyatakan Cukup

Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Kriteria Penerima Bantuan Program di Desa Jatirejo sebanyak 75% dengan skor 18 dan berada pada 67-100%., sehingga dapat dikatakan BAIK. Jadi responden menyatakan bahwa Kriteria Penerima Bantuan Program dalam pelaksanaan Bantuan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus sudah Terlaksana,

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yushaikal S.T Pada Tanggal (11/122019) jam 15.20 WIB, Jabatan sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dan hasil wawancara sebagai berikut :

“ menurut beliau, bahwa kegiatan pelaksanaan program bantuan rumah sehat layak huni yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik, karena penerima bantuan program ini diberikan kepada masyarakat miskin yang berhak menerimanya. Sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang sudah ditentukan.”

b. Tenaga Pendamping

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kriteria Penerima Bantuan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1	TPM melalui open rekrutmen	0 (0)	0 (0)	12 (12)	12 (12)

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

2	POKMAS berkoordinasi dengan TPM	0 (0)	0 (0)	12 (0)	12 (0)
3	Koordinasi Rtdan Rw	0 (0)	0 (0)	12 (12)	12 (12)
Jumlah		0	0	36	36

Berdasarkan tabel diatas teknik dan penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi} &= 3 \times 12 \\ &= 36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Indikator} &= 36 \times 3 \\ &= 108 \end{aligned}$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{36}{108} \times 100 = 33,33\%$$

Dapat diketahui bahwa tanggapan responden untuk menjawab indikator kedua yang terdiri dari 3 item penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan Baik pada item penilaian yang pertama yaitu tidak ada yang menjawab dan menyatakan Cukup Baik yaitu tidak Ada, dan menyatakan Kurang Baik sebanyak 12 orang.

Jawaban responden yang menyatakan Baik pada item penilaian yang pertama yaitu tidak ada yang menjawab dan menyatakan Cukup Baik yaitu tidak Ada, dan menyatakan Kurang Baik sebanyak 12 orang.

Jawaban responden yang menyatakan Baik pada item penilaian yang pertama yaitu tidak ada yang menjawab dan menyatakan Cukup Baik yaitu tidak Ada, dan menyatakan Kurang Baik sebanyak 12 orang.

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Tahap Penetapan Rencana Pembangunan didesa Jatirejo sebanyak 66% dengan skor 36 dan berada pada ukuran <34% dari jawaban responden, sehingga dapat dikatakan Kurang Baik.

Berdasarkan hasil wawancara (18/11/2019) yang dilakukan bersama ketua POKMAS mengenai indikator adalah perihal apakah ada koordinasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program:

“menurut beliau ada, mengadakan kerja sama apalagi masalah pembangunan tentunya membutuhkan kerja sama yang baik dengan RT dan RW yang ada di desa Jatirejo. Namun masih belum dilaksanakan dengan baik”

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden yang berjumlah sebanyak 12 orang responden dengan hasil pengamatan peneliti tentang Tenaga Pendamping dengan tanggapan responden bahwasannya seperti keikutertaan dalam menentukan program pembangunan, perencanaan pembangunan yang dilakukan belum terlaksana dengan baik.

Dari uraian data diatas, data hasil wawancara serta hasil pengamatan peneliti dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan Tenaga Pemdamping belum belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya tanggapan responden sebagai Pegawai Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berjumlah 2 responden terhadap indikator kriteria penerima bantuan yang terdiri dari 3 item penilaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Tenaga Pendamping Tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1	TPM melalui open rekrutmen	2 (6)	0 (0)	0 (0)	2 (6)

2	POKMAS berkoordinasi dengan TPM	2 (6)	0 (0)	0 (0)	2 (6)
3	Koordinasi Rtdan Rw	2 (6)	0 (0)	0 (0)	2 (6)
Jumlah		18	0	0	18

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas teknik dan penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi} &= 3 \times 2 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Indikator} &= 6 \times 3 \\ &= 24 \end{aligned}$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{18}{24} \times 100 = 75\%$$

Dapat diketahui pada indikator kedua yang terdiri dari 3 item penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan Baik pada item penilaian yang pertama yaitu sebanyak 2 orang dan menyatakan Cukup Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Pada item penilaian kedua yaitu masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak 2 orang dan menyatakan Cukup Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Pada item penilaian ketiga yaitu status kepemilikan tanah dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak 2 orang dan menyatakan Cukup Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Pendamping masyarakat di Desa Jatirejo sebanyak 75% dengan skor 18 dan berada pada 67-100%., sehingga

dapat dikatakan BAIK. Jadi responden menyatakan bahwa Kriteria Penerima Bantuan Program dalam pelaksanaan Bantuan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu sudah Terlaksana,

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yushaikal S.T Pada Tanggal (11/122019) jam 15.20 WIB, Jabatan sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dan hasil wawancara sebagai berikut :

“ menurut beliau, bahwa kegiatan Tim pendamping pelaksanaan program bantuan rumah sehat layak huni yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik, karena adanya koordinasi dengan organisasi kelompok setempat.

Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden yang berjumlah sebanyak 2 orang responden dengan hasil pengamatan peneliti tentang kriteria penerima program bantuan sudah cukup terlaksana yang sesuai dengan tanggapan responden bahwasannya seperti masyarakat menerima bantuan masyarakat miskin yang dilakukan sudah terlaksana.

c. Pelaksanaan Fisik

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Tenaga Pendamping Tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1	Pembangunan rumah sesuai dengan kualitas dan kuantitas	1 (3)	0 (0)	11 (11)	13 (14)

2	Rumah Layak Huni dibangun ditanah penerima bantuan	8 (24)	1 (2)	3 (3)	12 (29)
3	Rumah sesuai standar Layak Huni	1 (3)	3 (6)	8 (8)	12 (21)
Jumlah		30	7	22	59

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi} &= 3 \times 12 \\ &= 36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor indikator} &= 36 \times 3 \\ &= 108 \end{aligned}$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{59}{108} \times 100 = 54,6\%$$

Dapat diketahui pada indikator pertama yang terdiri dari 3 item penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan Baik pada item penilaian yang pertama yaitu sebanyak 1 orang dan menyatakan Cukup Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik sebanyak 11 orang .

Pada item penilaian kedua dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak 8 orang dan menyatakan Cukup Baik 1 orang dan menyatakan Kurang Baik 3 orang .

Pada item penilaian ketiga dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak 1 orang dan menyatakan 3 orang dan menyatakan Kurang baik 3 oraang .

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Pelaksanaan fisik di Desa Jatirejo sebanyak 54,6% dengan skor 59 dan berada pada 34%-66%., sehingga dapat dikatakan CUKUP BAIK. Jadi responden menyatakan bahwa Kriteria Penerima Bantuan Program dalam pelaksanaan Bantuan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus sudah Terlaksana,

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arsyad (18/11/2019) jam WIB, Jabatan sebagai Ketua POKMAS di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu dan hasil wawancara sebagai berikut :

“ menurut beliau, bahwa.” Dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan rumah sehat layak huni tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dikarenakan adanya berbagai kendala seperti Penyiapan administrasi pencairan dana. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden yang berjumlah sebanyak 12 orang responden dengan hasil pengamatan peneliti tentang kriteria penerima program bantuan sudah cukup terlaksana yang sesuai dengan tanggapan responden bahwasannya seperti masyarakat menerima bantuan masyarakat miskin yang dilakukan sudah terlaksana.

Dari uraian data diatas, data hasil wawancara serta hasil pengamatan peneliti dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan pelaksanaan fisik dilakukan sudah cukup terlaksana. Walaupun masih terdapat kekurangan sehingga indikator tahap penyusunan rencana menurut penulis berada pada rentang cukup berhasil.

Selanjutnya tanggapan responden sebagai Pegawai Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berjumlah 2 responden terhadap indikator kriteria penerima bantuan yang terdiri dari 3 item penilaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Tenaga Pendamping Tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu
Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian	Total
----	----------------	--------------------	-------

Berdasarkan tabel diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1	Pembangunan rumah sesuai dengan kualitas dan kuantitas	1 (3)	1 (2)	0 (0)	2 (6)
2	Rumah Layak Huni dibangun ditanah penerima bantuan	2 (6)	1 (4)	0 (0)	3 (10)
3	Rumah sesuai standar Layak Huni	0 (3)	2 (2)	0 (0)	2 (5)
Jumlah		12	8	0	20

$$\text{Skor tertinggi} = 3 \times 2 = 6$$

$$\text{Skor indikator} = 6 \times 3 = 24$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{20}{24} \times 100 = 83,33\%$$

Dapat diketahui pada indikator kedua yang terdiri dari 3 item penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan Baik pada item penilaian yang pertama yaitu sebanyak 1 orang dan menyatakan Cukup Baik sebanyak 1 orang dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Pada item penilaian kedua dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak 2 orang dan menyatakan Cukup Baik tidak ada yang menjawab dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Pada item penilaian ketiga yaitu status kepemilikan tanah dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak tidak ada dan menyatakan Cukup Baik 2 orang dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Pendamping masyarakat di Desa Jatirejo sebanyak 83,33% dengan skor 20 dan berada pada 67-100%., sehingga dapat dikatakan BAIK. Jadi responden menyatakan bahwa Kriteria

Penerima Bantuan Program dalam pelaksanaan Bantuan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus sudah Terlaksana,

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yushaikal S.T Pada Tanggal (11/12/2019) jam 15.20 WIB, Jabatan sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dan hasil wawancara sebagai berikut :

“ menurut beliau, bahwa terdapat kendala dalam pembangunan rumah layak huni yaitu di proses pencairan dana, dan pemakaian material bangunan.”

Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden yang berjumlah sebanyak 2 orang responden dengan hasil pengamatan peneliti tentang kriteria penerima program bantuan sudah cukup terlaksana yang sesuai dengan tanggapan responden bahwasannya seperti masyarakat menerima bantuan masyarakat miskin yang dilakukan sudah terlaksana.

Dari uraian data diatas, data hasil wawancara serta hasil pengamatan peneliti dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan pelaksanaan fisik dilakukan sudah cukup terlaksana. Walaupun masih terdapat kekurangan sehingga indikator tahap penyusunan rencana menurut penulis berada pada rentang cukup berhasil.

d. Monitoring program

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Monitoring Program Tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

1	PPTK Mengawasi pembangunan	3 (9)	9 (18)	0 (0)	12 (27)
2	Monitoring dimulai dari pencairan	0 (0)	5 (10)	7 (7)	12 (17)
3	Pembangunan rumah sesuai waktu	0 (0)	7 (14)	5 (5)	12 (19)
Jumlah		9	42	12	63

Berdasarkan tabel diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu

$$\text{Skor tertinggi} = 3 \times 12 = 36$$

$$\text{Skor indikator} = 36 \times 3 = 108$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{63}{108} \times 100 = 58,33\%$$

Dapat diketahui pada indikator pertama yang terdiri dari 3 item penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan Baik pada item penilaian yang pertama yaitu sebanyak 3 orang dan menyatakan Cukup Baik 9 orang dan kurang baik tidak ada yang menjawab

Pada item penilaian kedua dengan jawaban responden yang menyatakan Baik tidak ada dan menyatakan Cukup Baik 5 orang dan menyatakan Kurang Baik 7 orang .

Pada item penilaian ketiga dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak tidak adayang menjawab dan menyatakan cukup baik 7 orang dan menyatakan Kurang baik 5 orang .

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Pelaksanaan fisik di Desa Jatirejo sebanyak 58,33% dengan skor 63 dan berada pada 34%-66%., sehingga dapat dikatakan CUKUP BAIK. Jadi responden menyatakan bahwa Monitoring Program dalam pelaksanaan Bantuan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus sudah Terlaksana,

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arsyad (18/11/2019) jam WIB, Jabatan sebagai Ketua POKMAS di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu dan hasil wawancara sebagai berikut :

“ menurut beliau, bahwa.”Dalam melakukan monitoring program sudah dilaksanakan walaupun hanya sekali-sekali turun ke lapangan untuk memantau kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden yang berjumlah sebanyak 12 orang responden dengan hasil pengamatan peneliti tentang kriteria penerima program bantuan sudah cukup terlaksana yang sesuai dengan tanggapan responden bahwasannya seperti masyarakat menerima bantuan masyarakat miskin yang dilakukan sudah terlaksana.

Dari uraian data diatas, data hasil wawancara serta hasil pengamatan peneliti dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan pelaksanaan fisik dilakukan sudah cukup terlaksana. Walaupun masih terdapat kekurangan sehingga indikator tahap penyusunan rencana menurut penulis berada pada rentang cukup berhasil.

Selanjutnya tanggapan responden sebagai Pegawai Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berjumlah 2 responden terhadap indikator kriteria penerima bantuan yang terdiri dari 3 item penilaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.8 :Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Monitoring Program Tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1	PPTK Mengawasi pembangunan	0 (0)	2 (4)	0 (0)	2 (4)
2	Monitoring dimulai dari pencairan	0 (0)	1 (2)	1 (1)	2 (3)
3	Pembangunan rumah sesuai waktu	0 (0)	2 (4)	0 (0)	2 (4)
Jumlah		0	10	1	11

Berdasarkan tabel diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu:

$$\text{Skor tertinggi} = 3 \times 2 = 6$$

$$\text{Skor indikator} = 6 \times 3 = 18$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{11}{18} \times 100 = 61,11\%$$

Dapat diketahui pada indikator pertama yang terdiri dari 3 item penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan Baik pada item penilaian yang pertama tidak ada yang menjawab dan menyatakan cukup Baik 2 orang dan kurang baik tidak ada yang menjawab

Pada item penilaian kedua dengan jawaban responden yang menyatakan Baik tidak ada dan menyatakan Cukup Baik 1 orang dan menyatakan Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Pada item penilaian ketiga dengan jawaban responden yang menyatakan Baik yaitu sebanyak tidak adayang menjawab dan menyatakan cukup baik 2 orang dan menyatakan tidak ada yang menjawab .

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Pelaksanaan fisik di Desa Jatirejo sebanyak 61,11% dengan skor 11 dan berada pada 34%-66%., sehingga dapat dikatakan CUKUP BAIK. Jadi responden menyatakan bahwa Monitoring Program dalam pelaksanaan Bantuan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus sudah Terlaksana,

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yushaikal S.T Pada Tanggal (11/122019) jam 15.20 WIB, Jabatan sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dan hasil wawancara sebagai berikut

“ menurut beliau, bahwa.” Pihak PPTK sudah turun kelapangan mem monitoring program bantuan rumah sehat layak huni untuk memantau pelaksanaan program rumah layak huni”.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Jatirejo kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu, maka dapat disimpulkan mengenai evaluasi pelaksanaan bantuan rumah sehat layak hubni oleh dinas perumahan dan permukiman di dessa jatirejo kecamatan pasir penyus sudah cukup berhasil , walaupun masih terdapat kinerja dari pelaksana tugas pembangunan yang harus dioptimalkan sehingga dapat mendukung keberhasilan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tujuan yang telah ditetapkan.

C. Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu

Keberhasilan pembangunan rumah sehat layak huni dapat dilihat dari terlaksananya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni. Tujuan dan sasaran dari

peraturan itu sendiri akan memberikan dampak positif pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan rumah sehat layak huni adalah sebagai berikut :

1. Dana atau Biaya

Tercapainya Pelaksanaan Pembangunan rumah sehat layak huni di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu tidak semua berjalan dengan mulus, kurangnya anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan rumah sehat layak huni menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut. Besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah provinsi untuk pembangunan di setiap desa/kelurahan adalah sebesar Rp.57.500.000 untuk 1 (satu) unit rumah layak huni. Bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi masih dirasakan kurang oleh penerima bantuan rumah layak huni.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Safi/i selaku sebagai masyarakat penerima bantuan rumah layak huni.

“Rumah ini tidak dikeramik hanya lantai semen sebagian ruangan masih lantai kasar, baru ditempati sudah ada kerusakan seperti dinding retak-retak, miring, atap dan kamar wc nya tidak ada. Masih kurang dana untuk rumah ini.” (Senin, 19 Desember 2019).

Ketersediaan biaya pelaksanaan program merupakan tersediannya atau adanya anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program pembangunan rumah sehat layak huni. Jadi dengan tersedianya dana atau biaya dapat tersosialisasi dengan baik, program dapat berjalan baik, program dapat selesai dengan yang ditargetkan.

Berkaitan dengan kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah untuk program pembangunan rumah sehat layak huni berdampak pada kuantitas dan kualitas bangunan rumah sederhana layak huni tersebut, hal ini dikarenakan bahan material bangunan yang cukup mahal. Untuk mendapatkan kualitas bahan bangunan yang tentu diperlukan anggaran dana yang lebih agar pembangunan rumah sehat layak huni bisa lebih maksimal.

2. Ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan rumah sehat layak huni telah ditetapkan batas waktu untuk pembangunan rumah sehat layak huni telah ditetapkan batas waktu untuk pembangunan rumah sehat layak huni diwajibkan menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 90(sembilan puluh) hari atau 3 bulan kalender.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arsyad, selaku Ketua POKMAS, mengatakan:

“Tingginya upah tukang akibat pelaksanaan pekerjaan terputus-putus dan tukang tidak melaksanakan pekerjaan sampai selesai serta Terkendaa dalam penyediaan material yang sulit dijangkau.”

Ketepatan waktu pengerjaan adalah ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang sudah ditentukan. Sebab dengan penyelesaian pekerjaan dengan

tepat waktu, maka diharapkan program ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan program. Akan tetapi hal ini belum dapat terlaksana dikarenakan ada beberapa kendala yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu.

3. Tenaga kerja pelaksana

Program Pembangunan rumah sehat layak huni ini sangat berharap terhadap partisipasi masyarakat, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat kerja sama. Namun pada nyatanya pelaksanaan dilapangan mereka sangat mengandalkan adanya tukang sebagai pekerja. Sedangkan mencari tukang dengan upah yang murah sulit untuk ditemukan, karena mereka mengharapkan upah sesuai dengan pasaran yang berlaku.

Jadi dengan tersedianya jumlah tenaga kerja pelaksana yang mencukupi diharapkan pelaksanaan pekerjaan akan semakin cepat seperti yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan semakin baik. Akan tetapi hal ini tidak seperti yang diharapkan, karena ketersediaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni masih sangat minim.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Yushaikal, S.T (Senin, 12 Desember 2019) sebagai berikut:

“Faktor kendala yang jadi hambatan yang dihadapi dalam Pembangunan Rumah Sehat Layak antara lain yaitu Penyiapan administrasi pencairan dana Masih banyaknya pemakaian bahan kayu Terkendala dalam penyediaan material.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti tentang penghambat proses pelaksanaan pembangunan rumah layak huni adalah bahan material rumah kurang memadai dikarenakan biaya pembangunannya kecil.

BAB VI

PENUTUP DAN SARAN

Dari hasil Penelitian yang dilakukan penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pembangunan rumah sehat layak huni cukup terlaksana dilihat dari Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni.
2. Faktor kendala yang jadi hambatan yang dihadapi dalam Pembangunan Rumah Sehat Layak antara lain:
 - a. Penyiapan administrasi pencairan dana
 - b. Masih banyaknya pemakaian bahan kayu
 - c. Terkendala dalam penyediaan material
 - d. Tingginya Upah tukang akibat pelaksanaan pekerjaan yang terputus-putus dan tukang tidak melaksanakan pekerjaan sampai selesai.

- e. Masyarakat tidak puas dengan bentuk pembangunan rumah sehat layak huni ini.

B. Saran

Setelah dapat menyimpulkan hasil penelitian ini, maka berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyarankan kepada pihak terkait Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pelaksanaan Pembangunan tersebut mengacu kepada Peraturan yang sudah ada, agar pembangunannya sesuai dengan yang ditentukan. Sehingga masyarakat merasa puas.
2. Sebaiknya Ada Sosialisasi terhadap masyarakat penerima program agar lebih transparan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas serta tidak ada kecurigaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Affifudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Amirullah, dan Haris, Budiono, 2004, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Athoillah, Anton, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung : Pustaka Setia
- Dantes, Nyoman, 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2006, *Manajemen; Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta; Bumi Aksara
- , 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi Ketujuh Belas, Jakarta; Bumi Aksara
- Lubis, Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, Bandung; Mandarmaju
- Hamim, Sufian. 2003. *Administrasi Organisasi, dan Manajemen. Suatu Ilmu Teori, Konsep dan Aplikasi*. Pekanbaru: Press
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Hamanika
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Perusahaan*, Bandung: Rosda
- Manulang, Arthur, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Ghalia Bandung.
- Martoyo, Susilo, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bumi Aksara
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho, D. Rian, 2009, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elek media Komputindo: Jakarta
- Novitasari, Erna. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia
- Siagian (2003:112) Bandung: Penerbit Alumni. *Dasar-dasar Manajemen*.
- _____ (dalam Zulkifli; 2005:25). *Pengantar Manajemen*. Marpoyan Tujuh.
- Siagian, Melayu S.P 2014. *Manajemen: Dasar, pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara

- Siagian, Sondang P., 2014. *Filsafat Administrasi* ,Jakarta:Bumi Aksara.
- _____,2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Syafri Wirman.,2012. *Implementasi Kebijakan Publik*.Bandung: AIPI Bandung
- Siswanto.2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiono,2010. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto,2008. *Implementasi Kebijakan Publik “Konsep dan Aplikasinya*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Tacjhan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen Pekanbaru UIR Press*.
- Zulkifli dan Moris A. Yogja.2014. *Fungsi-fungsi manajemen*.Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Zulkifli dan Nurmasari.2015.*Pengantar Manajemen*.UIR Press. Pekanbaru

B.Dokumen

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pambangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP) Hasil penelitian Skripsi, Kertas kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR

Permenpera No 22/Permen/M/2008 tentang Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya